



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 27 Maret 2021

Halaman: 1

Siagakan Posko Penjagaan di Perbatasan

**Pemprov Siapkan Instruksi
Gubernur Dukung Larang Mudik**

**BANGKIT
BERSAMA**

JOGIA, Radar Jogja - Pemprov DIJ melakukan berbagai macam persiapan untuk menanggapi aturan larangan mudik dari pemerintah pusat pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini yang mengulangi kebijakan serupa pada tahun lalu. Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Kadamanta Baskara Aji. ▶ *Baca Siagakan... Hal 3*



CEK KENDARAAN: Mekanis bus mengecek armadanya di Terminal Jombor, Sieman, kemarin (26/3). Pemerintah pusat mengumumkan pelarangan mudik Lebaran 2021.

Sambungan dari hal 1
Menurut Aji, pemprov akan melakukan beberapa hal. Misalnya menyiapkan aturan turunan berupa surat edaran (SE) atau instruksi gubernur (Insgub). Juga untuk menyiagakan posko penjagaan di perbatasan jika nantinya dibutuhkan. Selain itu, Aji juga menyatakan aturan dari pemerintah pusat

itu cukup arif. Mengingat kasus harian konfirmasi positif virus korona di Tanah Air masih cukup mengkhawatirkan. "Mudik itu perjalanan panjang yang potensial memunculkan kerumunan," ujar Aji ketika ditemui di kantornya, Kepatihan Jogja, kemarin (26/3).

Lebih lanjut dikatakan, ia juga meminta semua pihak untuk waspada. Terutama posko-posko Covid-19 yang tersebar di berbagai kalurahan di DIJ. "Kewaspadaan teman-teman di posko kalurahan harus diaktifkan,

sehingga bisa dilakukan skrining nantinya," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat memastikan untuk meniadakan mudik Lebaran 2021. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk ASN dan karyawan BUMN, tapi juga karyawan swasta.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. "Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan 23 Maret 2021 di Kantor

Kemenko PMK serta hasil konsultasi dengan presiden, maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, peniadaan mudik Lebaran itu berpotensi mengurangi pergerakan manusia di Indonesia dengan jumlah yang masif. Sehingga dapat semakin mensukseskan upaya vaksinasi yang sedang dilakukan. (kur/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005